

Tinjauan Buku

Judul Buku : Filsafat Anti-Korupsi: Membedah Hasrat Kuasa, Pemburuan Kenikmatan, dan Sisi Hewani Manusia di Balik Korupsi
Pengarang : Reza A.A. Wattimena
Cetakan : 6, 2020
Penerbit : PT. Kanisius
Tebal isi buku : 230 halaman
ISSBN : 978-979-21-3362-2
Resensi oleh : Stefanus Fernandes dan Veronika Alviran Lembunai

Buku “*Filsafat Anti-Korupsi: Membedah Hasrat Kuasa, Pemburuan Kenikmatan, dan Sisi Hewani Manusia di Balik Korupsi*” karya Reza A.A. Wattimena adalah salah satu upaya filosofis yang langka dalam konteks wacana pemberantasan korupsi di Indonesia. Di tengah diskusi yang biasanya dikuasai pendekatan hukum, politik, dan ekonomi, buku ini menawarkan perspektif yang lebih dalam: melihat korupsi bukan sekadar sebagai pelanggaran peraturan, melainkan sebagai gejala eksistensial manusia, sesuatu yang berkaitan dengan kondisi-kondisi dasar yang memungkinkan manusia melakukan tindakan korup. Dengan inspirasi dari tradisi filsafat transendental Kant dan teori tindakan komunikatif Habermas, penulis mengajukan pertanyaan mendasar: apa syarat-syarat apriori yang membuat manusia cenderung korup? Dalam kerangka inilah buku ini bukan hanya menelaah fakta, melainkan menggali struktur terdalam dari mentalitas dan kecenderungan manusia yang melahirkan tindakan korupsi.

Reza menunjukkan bahwa akar korupsi bersifat multidimensi. Secara moral, korupsi adalah kerusakan karakter: perilaku yang menjauh dari yang baik dan merusak tatanan kebaikan bersama. Secara ekonomi dan hukum, korupsi identik dengan penyalahgunaan



kekuasaan dan pembengkakan aturan demi keuntungan pribadi. Sementara secara etimologis, istilah *corruptus* merujuk pada sesuatu yang telah rusak atau hancur. Penulis berhasil membawa tiap perspektif ini ke dalam satu rangkaian argumentatif yang utuh, sehingga pembaca melihat korupsi tidak lagi sebagai sekadar “uang sogokan” atau “penyalahgunaan jabatan,” tetapi sebagai gejala kerusakan moral yang jauh lebih mendalam dan sistemik.

Bab awal buku menelusuri bentuk-bentuk korupsi, terutama korupsi politik, yaitu penyalahgunaan kekuasaan publik demi kepentingan pribadi. Reza menguraikan bagaimana korupsi dapat menjadi penyakit sistemik, terutama di negara-negara berkembang, ketika hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak berjalan semestinya. Di sinilah problem korupsi tidak lagi berdiri sebagai tindakan individu, tetapi sebagai jaringan terstruktur yang mengakar dalam sistem politik dan ekonomi. Penjelasan ini diperkuat dengan gambaran mengenai bagaimana korupsi berkembang menjadi budaya suatu kondisi di mana tindakan korup diterima sebagai hal wajar, bahkan sebagai syarat bertahan hidup. Uraian ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat semata-mata mengandalkan aturan hukum; ia membutuhkan transformasi budaya.

Bagian menarik dari buku ini adalah penggalian refleksi filsafat klasik terkait korupsi. Reza menelusuri bagaimana para filsuf melihat korupsi sebagai lawan dari kemurnian sebuah kondisi jiwa yang tercemar oleh hasrat badan dan kenikmatan duniawi. Aristoteles, misalnya, memandang korupsi sebagai dekadensi moral yang dekat dengan hedonisme. Dalam konteks sosial-politik modern, pandangan ini dipadukan dengan analisis mengenai krisis kepercayaan di masyarakat. Ketika kesenjangan ekonomi meningkat dan kepercayaan antar anggota masyarakat menurun, lingkaran setan korupsi terbentuk: korupsi menghancurkan kepercayaan, dan hilangnya kepercayaan melahirkan lebih banyak korupsi. Ulasan Reza terhadap pemikiran Uslaner memperkaya pemahaman pembaca tentang mengapa korupsi begitu sulit diberantas, bahkan di negara-negara yang telah berganti rezim atau sistem politik sekalipun.

Salah satu kekuatan buku ini adalah keberaniannya membahas persoalan definisi korupsi sebagai masalah filosofis. Reza mengangkat persoalan bahwa definisi korupsi kerap kabur dan tergantung pada nilai budaya suatu masyarakat. Apa yang dianggap “hadiah ungkapan hormat” dalam satu budaya dapat dianggap sebagai “suap” dalam budaya lain. Penulis menolak relativisme semacam ini dan menilai bahwa penggunaan alasan budaya untuk membenarkan korupsi adalah

bentuk penyesatan moral. Ia menegaskan bahwa korupsi harus selalu diukur dengan prinsip keadilan, perdamaian, dan akuntabilitas. Dengan demikian, definisi korupsi tidak boleh didasarkan hanya pada hukum formal atau adat setempat, tetapi pada nilai moral universal yang menjunjung martabat manusia. Argumentasi ini sangat relevan bagi masyarakat Indonesia yang sering menggunakan alasan “kebiasaan,” “budaya kekeluargaan,” dan “silaturahmi” untuk menormalisasi praktik koruptif.

Penulis juga menjelaskan bagaimana kultur korupsi tumbuh dalam masyarakat yang mengalami kesenjangan ekonomi, lemahnya kepercayaan publik, dan sistem hukum yang tidak konsisten. Dalam situasi demikian, korupsi bukan lagi penyimpangan, tetapi justru menjadi norma sosial. Orang merasa harus korup supaya dapat bertahan hidup; sementara yang memilih untuk jujur justru terpinggirkan. Dengan analisis yang tajam, Reza menyebut kondisi ini sebagai hegemoni korupsi suatu kekuasaan sosial yang menindas, tetapi dianggap lumrah dan bahkan dianggap sebagai sesuatu yang berguna. Kritik ini menggugah pembaca untuk melihat bahwa korupsi bukan hanya soal perilaku individu, tetapi soal struktur sosial dan budaya yang membentuk cara berpikir masyarakat.

Buku ini juga menyajikan analisis komparatif mengenai negara-negara yang berhasil memberantas korupsi. Reza, melalui data yang dikutip dari Uslaner, menunjukkan bahwa hanya sedikit negara yang memiliki data lengkap mengenai korupsi, tanda bahwa sebagian besar negara tidak benar-benar berkomitmen pada pemberantasannya. Ia menyebut negara-negara seperti Swedia, Denmark, Hong Kong, dan Korea Selatan sebagai contoh di mana pendidikan universal dan sistem jaminan sosial yang kuat berperan besar dalam mengikis budaya korupsi. Penulis menekankan bahwa pendidikan gratis untuk semua warga adalah salah satu syarat utama untuk menumbuhkan kesadaran kritis dan moralitas publik yang lebih tinggi. Pendidikan, dalam analisisnya, bukan hanya soal transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan kesadaran akan nilai-nilai publik.

Reza juga menghubungkan korupsi dengan penyalahgunaan konsep-konsep dasar seperti “publik” dan “privat.” Ia menjelaskan bahwa korupsi terjadi ketika batas antara barang publik dan barang privat dihapuskan, sehingga kekuasaan publik dianggap sebagai milik pribadi. Pengaburan batas ini sering diperparah oleh ideologi ekonomi yang dominan, terutama liberalisasi ekonomi yang berlebihan, yang membuat orang menganggap segala sesuatu dapat diprivatisasi. Dalam konteks ini, tindakan koruptif tidak lagi muncul dari niat jahat, tetapi

dari ketidakmampuan membedakan antara kepentingan bersama dan kepentingan pribadi. Di Indonesia, fenomena ini terlihat jelas dalam kebiasaan menggunakan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi, mulai dari penggunaan mobil dinas untuk liburan hingga korupsi berjamaah dalam tender proyek.

Buku ini semakin kuat ketika penulis menyentuh akar antropologis dan psiko-filosofis korupsi. Menurut Reza, manusia memiliki dorongan-dorongan primordial hasrat berkuasa, pemburuan kenikmatan, naluri hewani yang sering kali mendorongnya ke tindakan korup jika tidak dikendalikan oleh moralitas dan sistem sosial yang sehat. Korupsi, dalam pandangan ini, adalah ekspresi dari kerapuhan manusia sekaligus dari buruknya sistem yang membiarkannya tumbuh. Perspektif ini penting karena mengingatkan pembaca bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya membutuhkan hukum yang kuat, tetapi juga pembentukan karakter, pembiasaan moral, dan transformasi kesadaran.

Dengan demikian, buku *“Filsafat Anti-Korupsi: Membedah Hasrat Kuasa, Pemburuan Kenikmatan, dan Sisi Hewani Manusia di Balik Korupsi”* adalah karya penting yang menawarkan pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang korupsi. Reza tidak berhenti pada kritik, tetapi memberikan arah praktis: perlunya sistem jaminan sosial yang kuat, pendidikan gratis berkualitas, pemimpin negara yang tegas, dan budaya publik yang mendorong transparansi serta akuntabilitas. Buku ini membawa pembaca pada kesadaran bahwa korupsi bukan hanya musuh negara, tetapi musuh martabat manusia. Dengan pendekatan filsafat yang lugas dan analisis yang tajam, Reza menghadirkan sebuah buku yang tidak hanya mengajak pembaca untuk memahami korupsi, tetapi juga untuk menyadari perannya dalam memutus rantai korupsi yang telah menjadi penyakit struktural di banyak negara, terutama Indonesia.



© Stefanus Fernandes dan Veronika Alviran Lembunai 2025

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-No Commercial-NoDerivatives 4.0 International License